

**FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PEREMPUAN DALAM KEPEMIMPINAN
NAGARI
(STUDI KASUS DI KENAGARIAN SUNGAI ASAM KECAMATAN 2 X 11 ENAM
LINGKUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN)**

SKRIPSI

*diajukan kepada Tim Penguji untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S1)
Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas
Negeri Padang*



**DESI ASTUTI
NIM.1106598/2011**

**JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2015**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Faktor-faktor Penghambat Perempuan dalam Kepemimpinan Nagari (Studi Kasus di Kenagarian Sungai Asam Kecamatan 2 X 11 Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman)

Nama : Desi Astuti

TM/NIM : 2011/1106598

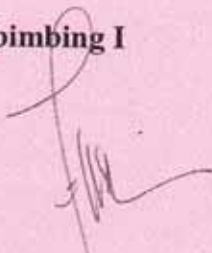
Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 10 Juli 2015

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Fatmariza, M.Hum
NIP. 19660404 199103 2 001

Pembimbing II



Dra. Al Rafni, M.Si
NIP. 19680212 199303 2 001

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI


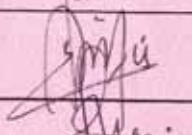



Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada hari Selasa, 14 Juli 2015 Pukul 08.30 s/d 10.00 WIB

Faktor-faktor Penghambat Perempuan dalam Kepemimpinan Nagari (Studi Kasus di Kenagarian Sungai Asam Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman)

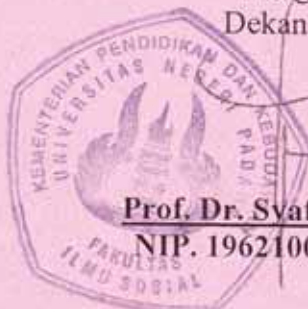
Nama : Desi Astuti
TM/NIM : 2011/1106598
Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 14 Juli 2015

Tim Penguji :

Nama	Tanda Tangan
Ketua : Dr. Fatmariza, M.Hum	
Sekretaris : Dra. Al Rafni, M.Si	
Anggota : Dr. Maria Montessori, M.Ed. M.Si	
Anggota : Drs. Nurman, S. M.Si	
Anggota : Dra. Aina, M.Pd	

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Desi Astuti
Nim/Tahun Masuk : 1106598/2011
Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "**Faktor-Faktor Penghambat Perempuan dalam Kepemimpinan Nagari (Studi Kasus di Kenagarian Sungai Asam Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman)**" adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi UNP maupun di masyarakat dan negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 27 Juli 2015
Saya yang menyatakan



DESI ASTUTI
NIM. 1106598/2011

ABSTRAK

Desi Astuti.2011/1106598: Faktor-faktor Penghambat Perempuan dalam Kepemimpinan Nagari (studi kasus di Kenagarian Sungai Asam Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman)

Penelitian ini di latarbelakangi oleh kurangnya partisipasi perempuan dalam kepemimpinan nagari, maka dilakukanlah penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan perempuan di nagari, faktor penghambat perempuan dalam kepemimpinan nagari, serta upaya perempuan dalam mengatasi hambatan di kepemimpinan nagari.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *puposive sampling*. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder, dikumpulkan melalui wawancara. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi. Teknik analisis data melalui cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukan di kenagarian Sungai Asam bahwa kepemimpinan perempuan belum maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya: 1) Di kenagarian Sungai Asam banyak perempuan belum menunjukkan minatnya untuk berperan di nagari. 2) Kurang kepercayaan diri perempuan di nagari Sungai Asam dengan potensi yang dimilikinya untuk berpartisipasi di nagari 3) Perempuan di kenagarian Sungai Asam menganggap berpartisipasi di nagari tidak penting. Faktor eksternal diantaranya: 1) Adat masih menjadi hal utama penghambat perempuan dalam kepemimpinan nagari. 2) Pendidikan perempuan yang lebih rendah menjadi penghambat dalam kepemimpinan nagari 3). Perempuan di nagari Sungai Asam memandang keluarga hal utama yang dipentingkan. 4) Banyaknya pekerjaan yang dilakukan perempuan menjadi penghambat dalam kepemimpinan nagari. 5) Di nagari Sungai Asam masyarakat masih memandang perempuan tidak pantas memimpin, sedangkan upaya yang dilakukan perempuan dalam mengatasi hambatan diantaranya: 1) Berusaha berpartisipasi di nagari 2) Dibidang agama 3) Dibidang pendidikan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “ **Faktor-faktor penghambat perempuan dalam kepemimpinan nagari (studi kasus di kenagarian Sungai Asam Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman)**”. Tak lupa shalawat dan salam senantiasa selalu tercurah kepada Nabi Besar Muhammad saw yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang berpendidikan.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dengan ketulusan hati penulis ingin menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terimakasih kepada:

1. Orang tua tercinta, Ayahanda Darwis dan Ibunda Ramalah yang telah memberikan dorongan dan doa kepada penulis sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Phil. Yanuar Kiram sebagai Rektor Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam pelaksanaan penulisan.
4. Ibu Dr. Maria Montessori M.Ed., M.Si dan ibu Dr. Fatmariza, M.Hum selaku

ketua dan sekretaris Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah memberikan izin kepada Penulis dalam menulis skripsi ini.

5. Ibu Dr. Fatmariza, M.Hum selaku Pembimbing I dan Ibu Dra Al Rafni, M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Maria Montessori M.Ed., M.Si, Bapak Drs. Nurman S, M.Si, dan Ibu Dra. Aina, M.Pd selaku Tim Penguji yang telah memberikan banyak masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini
7. Bapak Dr. Hasrul, M.Si selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan berbagai macam nasehat selama perkuliahan hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu staf pengajar dan kepastakan pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
9. Rekan-rekan mahasiswa PPKn angkatan 2011 dan teristimewa kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun/konstruktif guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirulalam, penulis ucapkan terimakasih.

Padang, Juli 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Batasan Masalah	12
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN TEORI	
A. KajianTeori	14
1. Konsep Kepemimpinan	14
2. Kepemimpinan Perempuan	16
3. Faktor-faktor Penghambata Kepemimpinan Perempuan	18
4. Kepemimpinan dalam Adat Minangkabau	28
5. Perempuan dalam Masyarakat Minangkabau	30
B. Kerangka Konseptual	34
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	36
C. Informan Penelitian	36
D. Jenis dan Sumber Data	40
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	30
F. TeknikPengujian Keabsahan Data	41
G. Teknik Analisis Data	42
BAB IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum	44
1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	44
a. Keadaan Geografis	44
b. Keadaan Demografi	45
c. Pendidikan	46
d. Mata Pencarian	48
e. Agama	49
f. Profil Perempuan yang aktif di nagari	50
B. Temuan Khusus	52

1. Fenomena Kepemimpinan Perempuan	53
2. Faktor Penghambat Kepemimpinan Perempuan.....	65
a. Faktor Internal.....	66
1) Minat Diri.....	66
2) Percaya Diri.....	67
3) Sikap Pandang.....	69
b. Faktor Eksternal.....	71
1) Adat dan Budaya.....	71
2) Keluarga.....	77
3) Ekonomi.....	80
4) Pendidikan.....	82
5) Persepsi Masyarakat.....	85
3. Upaya yang dilakukan Perempuan dalam mengatasi hambatan..	87
C. Pembahasan.....	89
1. Fenomena Kepemimpinan Perempuan.....	89
2. Faktor-faktor Penghambat Kepemimpinan Perempuan.....	92
4. Upaya yang dilakukan Perempuan dalam mengatasi hambatan..	97
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	107

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Bamus periode 2008-20014	6
2. Bamus periode 2014-2020	7
3. Daftar informan penelitian	38
4. Jumlah penduduk nagari Sungai Asam	46
5. Sarana pendidikan di nagari Sungai Asam	47
6. Tingkat pendidikan di nagari Sungai Asam	47
7. Sarana ibadah di nagari Sungai Asam	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Peraturan pengangkatan Bamus	108
2. Pedoman wawancara.....	111
3. Foto-foto pada saat wawancara.....	113
4. Surat rekomendasi dari FIS UNP.....	118
5. Surat Rekomendasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Padang Pariaman	119
6. Surat pernyataan telah meneliti Wali Nagari Sungai Asam.....	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan jaman telah banyak mengubah pandangan tentang perempuan, mulai dari pandangan yang menyebutkan bahwa perempuan hanya berhak mengurus rumah tangga dan selalu berada dirumah, sedangkan laki-laki adalah makhluk yang harus berada diluar rumah, kemudian dengan adanya perkembangan jaman dan emansipasi wanita yang menyebabkan perempuan memperoleh hak yang sama seperti laki-laki, salah satunya yaitu dibidang kepemimpinan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Burhanuddin (1994:62), kepemimpinan merupakan *the ability and readiness to inspire, guide, direct, or manage order*, yang berarti kepemimpinan merupakan suatu kemampuan dan kesiapan seseorang untuk mempengaruhi, membimbing, dan mengarahkan atau mengelola orang lain agar mereka mau berbuat sesuatu demi tercapainya tujuan bersama. Yang tidak menutup kemungkinan perempuan untuk aktif didalamnya.

Kepemimpinan di Minangkabau dijalankan oleh niniak mamak, alim ulama serta cadiak pandai yang disebut dengan Tungku Tigo Sajarangan dengan berasaskan pada Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah. Berbicara mengenai peranan perempuan dalam kepemimpinan di Minangkabau, hanya sedikit peranan perempuan dalam kepemimpinan, yang cuma dilaksanakan melalui peran Bundo Kanduang, karena streotipnya perempuan Minang hanya di peruntukan untuk mengurus keluarga saja.

Kemudian lebih lanjut, telah banyak sekarang ini peraturan yang mengatur mengenai perempuan atau kesetaraan gender, salah satunya yaitu pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi “ setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Maksud dari pasal diatas adalah tentang persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, yang tidak melarang perempuan ikut berkarya untuk memajukan bangsa, dan tidak ditemukan aturan hukum yang melarang perempuan ikut serta dan mengambil peran dalam pemerintahan seperti yang dilakukan oleh laki-laki.

Indonesia telah meratifikasi deklarasi universal Hak Azazi Manusia, konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*convention on the elimination of all form of discrimination againts women CEDAW*) yang disahkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1984, pasal 7 yang menyatakan bahwa : kesetaraan perempuan dalam kehidupan politik dan publik, kewajiban untuk (1). Melaksanakan langkah tindak yang tepat menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan publik. (2) menjamin bagi perempuan atas dasar kesetaraan dengan laki-laki untuk : a). Memberikan suara dalam semua pemilihan umum dan jajak pendapat publik. b) dapat dipilih dalam pemilihan umum untuk semua lembaga yang didasarkan atas pemilihan. c) berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya, d) memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di

semua tingkat, e) berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan non pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara. (Achie Sudiarti Luhulima, 2014 : 63).

Kemudian lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2011 pasal 2 ayat (2) dan ayat (5) tentang partai politik, juga menjelaskan bahwa : “Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan”. “Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan”.

Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 Pasal 8 ayat (2) huruf e tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, juga menyatakan bahwa : “menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”. Demikian juga dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dalam Pasal 58 ayat (1), yang juga menjelaskan keterlibatan perempuan dipemerintahan, dinyatakan sebagai berikut : “Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa”.

Dalam perkembangan globalisasi sekarang, banyak peran yang dilakukan oleh laki-laki, seperti berpartisipasi dalam politik, ikut dalam pemerintahan,

tapi juga dilakukan oleh perempuan, yang memberikan anggapan bahwa dalam hal kualitas antara perempuan dengan laki-laki tidak berbeda. Bila dilihat dari kenyataannya, dapat dicontohkan dalam masyarakat, sedikitnya representasi perempuan dalam politik, sebagaimana keanggotaan DPRD provinsi Sumatera Barat periode 2014-2019, bahwa dari 65 anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, keterwakilan perempuan hanya 7 orang, ini terlihat kecilnya peran perempuan dibidang perpolitikan.

Begitu juga pada pemerintahan ditingkat Kabupaten Padang Pariaman, pada pemilihan Bupati Padang Pariaman yang telah dilakukan sebanyak 19 kali pemilihan, namun tidak pernah perempuan yang menjabat sebagai Bupati di Padang Pariaman (*id.wikipedia.com*). Sementara di kecamatan 2X11 Enam Lingsung, pernah satu kali masa jabatan yang dipegang oleh perempuan. Sedangkan dengan wali nagari diseluruh Sumatera Barat, dalam (Fatmariza : 2014), menyatakan bahwa jumlah seluruh wali nagari di Sumatera Barat berjumlah 574 wali nagari dan 7 dari 574 wali nagari di Sumatera Barat yang menjabat sebagai wali nagari perempuan di Sumatera Barat, hal ini berarti hanya 1 % keterwakilan perempuan dalam pemerintahan nagari di Sumatera Barat.

Begitu juga dengan Pemerintahan di Kenagarian Sungai Asam Kecamatan 2X11 Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman, juga terlihat sama, dimana pada pemerintahan kenagarian Sungai Asam kurangnya keikutsertaan perempuan dalam kepemimpinan di kenagarian ini, seperti yang terlihat pada pemerintahan nagari, sejak diberlakukannya kembali kepada

nagari, dikenagarian Sungai Asam sudah dilakukan pemilihan wali nagari sebanyak empat kali, tapi yang menjadi wali nagari di kenagarian Sungai Asam adalah laki-laki, begitu juga pada kaur-kaur pemerintahan nagarinya, dari sekian banyak kaur semuanya di pegang oleh laki-laki, sedangkan perempuan hanya sebagai staf pembantu saja, sebagaimana pemaparan Bapak Buyung perangkat kenagarian Sungai Asam yang diwawancarai pada hari jumat, 12 desember 2014, menerangkan bahwa :

“Memang di Kenagarian Sungai Asam sudah dilakukan pemilihan wali nagari sebanyak empat kali, tapi yang terpilih semuanya menjadi wali nagari adalah laki-laki, tapi berbeda yang mencalon menjadi wali nagari Sungai Asam kemaren, ada satu orang perempuan yang mencalon, yaitu Ir. Dewi Wisanti tapi hasilnya tetap sama, tidak terpilih hanya mendapat 60 suara saja”

Dari penjelasan bapak Buyung diatas dapat dinyatakan bahwa tidak banyaknya masyarakat nagari Sungai Asam yang memilih perempuan sebagai wali nagari mereka, bahkan perempuan sendiri tidak memilih perempuan sebagai wali nagarinya. Jadi dapat dikatakan berdasarkan pernyataan diatas bahwa tidak percayanya masyarakat nagari Sungai Asam perempuan menjadi pemimpin bagi mereka.

Hal ini terlihat dari daftar pemilih tetap di nagari Sungai Asam yaitu sebanyak 3000 pemilih, dengan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 1710 pemilih, dengan rincian data pemilih laki-laki sebanyak 707 pemilih dan perempuan 1003 pemilih. Dari sekian banyak pemilih di nagari Sungai Asam mereka tidak menaruh minat untuk menjadikan perempuan atau mewakili suara perempuan untuk ikut berpartisipasi di pemerintahan nagari.

Selain ditingkat pemerintahan nagari di Sungai Asam, terlihat pada lembaga nagari di kenagarian Sungai Asam, seperti pada Bamus Nagari (Badan Musyawarah Nagari), Bamus pada periode 2008-2014 dengan jumlah anggota 11 orang, tapi perwakilan perempuan hanya 2 orang saja, begitu juga pada periode 2014-2020, dimana perwakilan anggota Bamus di Nagari Sungai Asam adalah sebanyak 9 orang, dimana dari sembilan (9) orang tersebut keterwakilan perempuan kembali dua orang, dari hasil diatas terlihat masih kurangnya peran perempuan dalam lembaga nagari. Dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 1
Bamus Nagari Sungai Asam periode 2008-2014

No.	Nama	Jabatan
1	Syamsunar, BA datuak majo	Ketua
2	Ali Mukhtar	Wakil Ketua
3	Zainir, ST datuak rangkayo mulie	Ketua BD. Ekonomi Pembangunan
4	Insut datuak jalelo	Ketua BD. Pembangunan
5	Irman datuak putih	Ketua BD. Kesejahteraan Rakyat
6	M. Natsir datuak parpatiah	Anggota
7	Syahril tuangku sidi	Anggota
8	Bakhtiar	Anggota
9	Syafrizal, SS	Anggota
10	<u>Nurbaiti</u>	<u>Anggota</u>
11	<u>Zaiti, S.Pd</u>	<u>Anggota</u>
	Oyong Liza, ST	Sekretaris

TABEL 2
Bamus Nagari Sungai Asam periode 2014-2020

No.	Nama	Jabatan
1	Zainir, ST Datuak Rangkayo Mulie	Anggota
2	Syamsunar, BA Datuak Majo	Anggota
3	Irman Datuak Putih	Ketua
4	Syafrizal, SS	Sekretaris
5	<u>Zaiti, S.Pd</u>	<u>Anggota</u>
6	<u>Martini, S.St</u>	<u>Anggota</u>
7	Ali Mukhtar	Anggota
8	Basri Jamil Datuak Rangkayo Gadang	Anggota
9	ABD Rahman	Anggota

Begitu juga pada lembaga KAN (Kerapatan Adat Nagari), pada lembaga KAN ini tidak adanya keterwakilan perempuan dalam kepengurusan organisasi ini, sesuai dengan pemaparan Wali Nagari Sungai Asam, bapak Yuliasman pada Jumat 12 desember 2014, beliau mengungkapkan bahwa:

“Dalam kepengurusan KAN di nagari Sungai Asam memang tidak di ikut sertakan perempuan, semuanya hanya datuak-datuak yang ada di nagari Sungai Asam, tapi secara seharusnya memang ada peran perempuan atau bundo kanduang dalam kepengurusan KAN, tapi di nagari kita tidak memakai peranan Bundo Kanduang. Sementara dalam menetapkan perempuan ikut serta dalam kepengurusan organisasi di Nagari Sungai Asam ini, kita berpedoman kepada peraturan daerah yang ada yaitu perda no 6 tahun 2014 dan dalam menetapkan perempuan dalam kepengurusan organisasi di kenagarian tidak memiliki syarat-syarat yang rumit, hanya tamatan minimal SMP, umur minimal 20 tahun serta tercatat warga asli di kenagarian sungai asam, dan tidak perangkat pemerintahan di nagari. Nah selain itu yang penting orang-orang tersebut merupakan usulan-usulan dari kaum perempuan di nagari, lalu orang yang peduli terhadap kehidupan bermasyarakat serta perlu aktif dalam kegiatan perempuan ”

Dan sesuai juga dengan pemaparan bapak Buyung pengurus dikantor wali nagari Sungai Asam, mengenai keiuktsertaan perempuan dalam

kepengurusan lembaga nagari KAN, pada jumat 13 maret 2013, menerangkan bahwa:

iya, dinagari kita dalam kepengurusan KAN memang tidak mengikutsertakan perempuan atau Bundo Kanduang, hal ini dikarenakan KAN merupakan organisasi perkumpulan dari niniak-niniak mamak atau datuak-datuak di nagari Sungai Asam, nah karena KAN merupakan perkumpulan dari niniak mamak ini lah tidak diikutsertakan perempuan didalamnya, selain itu niniak mamak juga orang laki-laki semua, yaitu orang yang ditinggikan didalam kaum, dan tidak ada namanya niniak mamak yang perempuan, semuanya laki-laki, maka dari itu juga Kepengurusan KAN tidak mengikutsertakan perempuan, kalau perempuan diikutkan, itu sama saja jadinya meremehkan martabat laki-laki atau niniak mamak itu.

Dari penjelasan bapak Buyung diatas, dapat dijelaskan bahwa di Nagari Sungai Asam dalam kepengurusan KAN memang tidak mengikut sertakan perempuan, karena dalam kepengurusan KAN hanya dilakukan oleh penghulu atau niniak mamak, dimana niniak mamak selalu dipegang oleh laki-laki, dan perempuan bukanlah niniak mamak.

Dilihat dari kepengurusan lembaga nagari di kenagarian Sungai Asam, kurangnya peranan perempuan dalam organisasi, yang berbeda dari teori yang berkembang sekarang ini, dimana sekarang ini perempuan tidak dibatasi untuk ikut dalam perpolitikan, serta aktif dalam pemerintahan, tapi tidak begitu terlihat dalam pemerintahan nagari Sungai Asam. Selain itu adanya kebiasaan pergi merantau di kenagarian Sungai Asam Kecamatan 2X11 Enam Lingsung, dimana mereka tidak ikut serta berpartisipasi dalam kepemimpinan nagari, dan lebih memilih pergi merantau, karena dengan merantau mereka akan dapat pekerjaan yang layak. tercatat pada tahun 2012, 54 orang yang membuat surat pindah yang terdiri dari 33 perempuan dan 21 laki-laki, sedangkan tahun 2013

sebanyak 43 orang dengan rincian 26 perempuan dan 17 laki-laki dan tahun 2014 sebanyak 41 orang yang membuat surat pindah dengan rincian 16 perempuan dan 25 laki-laki, dan berdasarkan pemaparan bapak Buyung pada jumat 12 desember 2014, menerangkan bahwa:

Dapat diperkirakan bahwa lebih dari 50 persen masyarakat Sungai Asam ini pergi merantau, setelah tamat sekolah merantau, tidak ada pekerjaan di rumah ia pergi merantau, itu pada umumnya alasan mereka pergi merantau. Tidak semua yang pergi merantau melaporkan ke kantor wali nagari dan membuat surat keterangan pindah bahwa mereka telah pergi merantau.”

Berdasarkan pernyataan bapak Buyung diatas, dapat disimpulkan bahwa kebiasaan merantau yang dilakukan masyarakat Sungai Asam hal itu berarti menumbuhkan kurangnya minat dari masyarakat Sungai Asam untuk aktif di pemerintahan nagari baik itu laki-laki ataupun perempuan. selain itu, penulis melihat karena umumnya masyarakat Sungai Asam bekerja sebagai petani dan berdagang yang lebih banyak dilakukan oleh perempuan, karena hal tersebut mengurangi minat masyarakat untuk aktif di pemerintahan nagari, melainkan lebih memilih melakukan pekerjaan yang mereka kerjakan sehari-hari.

Dari data-data yang didapat, jadi dapat digambarkan yang menjadi faktor-faktor penghambat perempuan dalam kepemimpinan nagari di kenagarian Sungai Asam Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman adalah kurangnya minat perempuan untuk ikut aktif dalam kepemimpinan di tingkat nagari, terlihat bahwa dari sekian banyak jumlah penduduk nagari sungai asam yaitu sebanyak 3.769 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 1847 jiwa dan perempuan 1922 jiwa, selain itu kurangnya

sosialisasi dari pemerintahan nagari dalam pemilihan anggota organisasi nagari itu sendiri, dimana dalam perekrutan anggota organisasi nagari atau kepengurusan nagari, lebih diutamakan orang yang terdekat dengan wali nagari dan kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat, hal ini sebagaimana penuturan dari Uni Yati pada 12 april 2015, sebagai berikut :

Kalau soal sosialisasi dari pemerintahan nagari, misalnya mengenai pemilihan anggota Bamus atau semacamnya, uni rasa selama ini belum ada ya yang begituan dari nagari Sungai Asam. Misalnya saja, kemaren ini, kan ada pemilihan wali jorong di jorong Sigaung ini, tapi juga tidak ada pemberitahuan dari penitia pelaksana bahwa kita akan melaksanakan pemilihan wali jorong, tau-taunya sudah memilih, selian itu paling yang datang pas pemilihan ya orang-orang terdekatnya saja, yang tau beritanya,

Berdasarkan pernyataan uni Yati tersebut, bahwa perekrutan orang dalam pemerintahan nagari memang kurang sosialisasi yang di berikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat kurang peduli terhadap hal-hal tersebut, dan menumbuhkan kurangnya minat dari masyarakat pada hal-hal pemerintahan nagari. serta tidak adanya kepercayaan dari masyarakat Sungai Asam sendiri terhadap perempuan yang akan memimpin di nagari, hal ini terlihat dari adanya calon walinagari yang perempuan, namun hanya mendapatkan suara yang rendah, hal ini berarti tidak adanya kepercayaan masyarakat nagari Sungai Asam kepada perempuan untuk aktif dalam pemerintahan, dan faktor lain yang menjadi penghambat perempuan di kepemimpinan nagari adalah adanya kebiasaan pergi merantau yang dilakukan oleh masyarakat sungai asam, berdasarkan wawancara dengan bapak Buyung, perangkat nagari di Sungai Asam, menyatakan bahwa lebih dari 50% masyarakat nagari Sungai Asam

yang pergi merantau, begitu juga dengan perempuannya, yang tentunya menghalangi perempuan untuk aktif dalam pemerintahan nagari.

Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kenapa kepemimpinan perempuan di kenagarian Sungai Asam ini sangat kurang, dan apa saja penyebab kurangnya kepemimpinan perempuan pada kenagarian sungai asam tersebut, yang tertuang dalam skripsi **“ faktor-faktor penghambat perempuan dalam kepemimpinan nagari (studi kasus di kenagarian Sungai Asam Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman.)”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan rumusan latarbelakang diatas maka disini penulis dapat memperoleh identifikasi masalah yaitu sebagai berikut :

1. Kurangnya sosialisasi dari pemerintahan nagari dalam perekrutan organisasi nagari di kenagarian Sungai Asam Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman.
2. Kurangnya rasa kepercayaan masyarakat nagari Sungai Asam Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman terhadap perempuan dalam memimpin
3. Kebiasaan merantau yang dilakukan masyarakat di kenagarian Sungai Asam Kecamatan 2X11 Enam Lingkung.
4. Kurangnya minat perempuan untuk aktif dalam pemerintahan di kenagarian Sungai Asam Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Paadang Pariaman.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan gambaran indentifikasi masalah diatas maka pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana faktor-faktor hambatan perempuan dalam kepemimpinan nagari di kenagarian Sungai Asam Kecamatan 2X11 Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kepemimpinan perempuan dalam nagari di kenagarian Sungai Asam Kecamatan 2X11 Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman?
2. Apakah faktor-faktor penghambat perempuan dalam kepemimpinan nagari di kenagarian Sungai Asam Kecamatan 2X11 Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman ?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh perempuan dalam mengatasi hambatan kepemimpinan nagari di Kenagarian Sungai Asam Kecamatan 2X11 Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman?

E. Tujuan Penelitian

Dari paparan latar belakang, indentifikasi masalah, dan rumusan masalah di atas, maka secara sederhana tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui kepemimpinan perempuan dalam nagari di kenagarian Sungai Asam Kecamatan 2X11 Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat perempuan dalam kepemimpinan nagari di kenagarian Sungai Asam Kecamatan 2X11 Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh perempuan dalam mengatasi hambatan kepemimpinan nagari di Kenagarian Sungai Asam Kecamatan 2X11 Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman

F. Manfaat Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis, diharapkan penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai faktor-faktor hambatan perempuan dalam kepemimpinan nagari di kenagarian Sungai Asam Kecamatan 2X11 Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman
2. Pengembangan Teori, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan teori-teori yang relevan dalam permasalahan dengan penelitian ini dan dapat memberikan kontribusi positif.
3. Secara Praktis, penulis berharap tulisan ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang pentingnya faktor penyebab hambatan perempuan dalam kepemimpinan nagari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan mengenai faktor-faktor penghambat perempuan dalam kepemimpinan nagari di kenagarian Sungai Asam, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepemimpinan perempuan di Kenagarian Sungai Asam masih jauh dari kata cukup. Keikutsertaan perempuan baik pada kepemimpinan di Nagari Sungai Asam hanya sebatas untuk mencukupi kuota atau prasyarat dari keterwakilan perempuan dalam suatu organisasi dan tidak memberikan kontribusi yang berarti dalam pemerintahan nagari karena perempuan sebatas pendukung saja. Perempuan untuk menjadi pemimpin di Nagari Sungai Asam dapat dikatakan tidak cocok, karena di pengaruhi oleh adat dan budaya yang di Kenagarian Sungai Asam, selain itu untuk menjadi pemimpin di Nagari Sungai Asam, bagi perempuan harus melalui proses yang panjang.
2. Di Kenagarian Sungai Asam terlihat masih kuatnya budaya patriarki, dimana mereka menerapkan bahwa dalam hal memimpin harus dipegang oleh laki-laki, walaupun laki-laki tersebut tidak pantas untuk menjadi pemimpin, serta mengesampingkan perempuan-perempuan yang memiliki potensi besar yang ada di Kenagarian Sungai Asam.
3. Faktor-faktor penghambat perempuan dalam kepemimpinan nagari di kenagarian Sungai Asam dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1) faktor internal yang terdiri dari 3 kelompok adalah : a) minat diri, minat menjadi

penghambat bagi perempuan dalam berpartisipasi dalam kepemimpinan nagari, karena perempuan untuk dapat berkontribusi dalam nagari tergantung dari minat si perempuan tersebut terhadap permasalahan-permasalahan dalam nagari dan untuk memajukan nagari. b) percaya diri, jika perempuan-perempuan di kenagarian Sungai Asam tidak percaya dan yakin akan kemampuan dirinya yang dimilikinya, maka potensi-potensi yang dimiliki tersebut tidak akan terlaksana jika perempuan-perempuan tersebut tidak percaya pada diri mereka sendiri. c) sikap pandang, telah banyak perempuan-perempuan di Nagari Sungai Asam ini beranggapan bahwa bekerja di nagari itu tidak ada manfaatnya bagi kehidupan mereka, karena bekerja di nagari hanya bekerja secara sosial saja untuk kepentingan masyarakat banyak dan tidak mendapatkan imbalan, itu lah yang menjadi bahan pertimbangan oleh perempuan untuk bekerja di nagari, akan lebih baik mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka sendiri. faktor kedua yang menjadi penghambat perempuan dalam kepemimpinan nagari adalah faktor yang berasal dari luar diri si perempuan yaitu faktor eksternal yang terbagi menjadi: a) adat dan budaya, adat dan budaya menjadi hal yang paling mendasar bagi penghambat perempuan dalam kepemimpinan nagari karena adat dan tradisi yang berjalan turun-temurun di Nagari Sungai Asam, dimana di Nagari Sungai Asam yang banyak melakukan acara-acara adat, dan setiap acara adat tersebut selalu mengikutsertakan wali nagari untuk duduk bersama dengan ninik mamak serta alim ulama, dan jika perempuan yang menjadi wali nagari, dan duduk

bersama dengan ninik mamak, itu sangat tabu untuk di pandang. Dan adanya anggapan bahwa perempuan tidak pantas untuk memimpin karena bagi perempuan untuk melangkahi laki-laki tidak layak atau tabu untuk dilakukan. b) pendidikan , saat sekarang pendidikan memang sudah di anggap paling penting, begitu juga pada pemerintahan nagari, untuk dapat berkontribusi dalam pemerintahan nagari, juga harus orang-orang berpendidikan minimal tamatan SMA. c) keluarga, banyak hal yang dipertimbangkan oleh perempuan jika ia ikut serta dalam kepemimpinan nagari, salah satunya keluarga, apalagi bagi mereka yang sudah berumah tangga, tanggung jawab serta pekerjaan mereka akan bertambah lagi dalam keluarga, itu kenapa perempuan kurang menaruh minat dalam kepemimpinana nagari, karena keluarga yang harus mereka tinggalkan. d) ekonomi, ekonomi juga menjadi pengahambat perempuan dalam kepemimpinan nagari di Nagari Sungai Asam, karena kebanyakan mata pencarian di Nagari Sungai Asam bertani dan berdagang, merekan akan lebih memilih untuk melakukan pekerjaan rutin mereka untuk memenuhi kebutuhan pribadi dari pada ikut serta dalam kepemimpinan nagari. e) masyarakat, sekarang ini masih kurang mendapat respon dari masyarakat Sungai Asam jika perempuan berminat menjadi pemimpin di nagari.

4. Telah banyak upaya yang dilakukan perempuan untuk mengatasi hambatan dalam kepemimpinan nagari, diantaranya : a) telah adanya pencalonan oleh perempuan dalam pemilihan wali nagari, hal itu telah ada minat yang tinggi oleh perempuan untuk berkontribusi dalam nagari. b) di bidang agama,

banyaknya pengajian dan TPA yang di dirikan oleh perempuan. c) di bidang pendidikan, perempuan yang menjadi penggerak untuk berjalannya PAUD di nagari Sungai Asam.

B. Saran

penulis melihat masih kurangnya kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan nagari, karena dianggap perempuan tidak pantas memerintah dalam nagari, yang di pengaruhi oleh adat-adat yang ada di Nagari Sungai Asam ini, maka dari itu penulis berharap kepada pemerintahan Nagari Sungai Asam dapat memberikan kesempatan yang lebih luas lagi kepada perempuan untuk mengembangkan potensinya dalam memajukan nagari, tanpa dilatarbelakangi oleh adat-adat yang mengikat tersebut, dan tidak salahnya untuk mencoba, karena bila dilihat dari segi kemampuan perempuan-perempuan di Nagari Sungai Asam memiliki potensi-potensi yang besar dalam memajukan nagari.

Selanjutnya bagi masyarakat kenagarian Sungai Asam, bukanlah pandangan bahwa perempuan tersebut jika memimpin tidak kurang kiprahnya dari pada laki-laki, mereka memiliki potensi-potensi yang besar, keberanian yang kuat serta tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

Penulis menyadari penelitian tentang faktor-faktor penghambat perempuan dalam kepemimpinan nagari ini belum begitu sempurna. Penulis mengharapkan bagi pembaca yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan

tema yang sama agar dapat untuk menggali dan mengkaji lebih dalam lagi mengenai faktor-faktor penghambat perempuan dalam kepemimpinan nagari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Achie Sudiarti Luhulima. 2014. Cedaw Menegakkan Hak Asasi Perempuan. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami penelitian kualitatif. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Brunetta R Wolfman. 1989. Peran kaum wanita bagaimana menjadi cakap dan seimbang dalam aneka peran. Yogyakarta : Kanisius.
- Burhanuddin. 1994. Analisa Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan. Jakarta : Bumi Aksara.
- Fatmariza. 2014. Profil dan Statistik Gender Provinsi Sumatera Barat. Padang.
- Jalius DT. Malako Nan Putihah. 2004. Mambangkik Batang Tarandam Dalam Upaya Mewariskan Dan Melestarikan Adat Minangkabau Menghadapi Modernisasi Kehidupan Bangsa. Bandung : Citra Umbara Halaman.
- Lany Verayanti dkk. 2003. Partisipasi politik perempuan Minang dalam sistem masyarakat matrilineal. Padang : LP2M Sumatera Barat.
- Musyair Zainuddin. 2008. Implementasi pemerintahan nagari berdasarkan hak asal-usul adat minangkabau. Yogyakarta : Ombak.
- Siti musdah mulia dan Anik Faridah. 2005. Perempuan dan Politik. Jakarta : PT Gramedia Pustaka utama.
- Sugiyono. 2012. Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R dan D. Bandung : Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2010. Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi. 2011. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada .